

**MANAJEMEN KOMUNIKASI BENCANA GEMPA BUMI LOMBOK
PADA MASA TANGGAP DARURAT DI LOMBOK NUSA TENGGARA
BARAT**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika**

Oleh :

MUHAMAD RISQI MEI SONJAYA

L100150061

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**MANAJEMEN KOMUNIKASI BENCANA GEMPA BUMI LOMBOK PADA MASA
TANGAP DARURAT DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

MUHAMAD RISQI MEI SONJAYA

L100 150061

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Dian Purworini, M.M.

NIK. 1102

HALAMAN PENGESAHAN

**MANAJEMEN KOMUNIKASI BENCANA GEMPA BUMI LOMBOK PADA MASA
TANGAP DARURAT DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT**

OLEH

MUHAMAD RISQI MEI SONJAYA

L100 150061

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Komunikasi dan Informatika
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 21 November 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Dr. Dian Purworini, M.M.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Agus Triyono, M.Si.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Pundra Rengga Andhita, M.I.Kom**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



Nugroho, S.T., M.Sc., Ph. D.

NIK. 881

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 November 2019

Penulis



MUHAMAD RISQI MEI SONJAYA

L100150061

MANAJEMEN KOMUNIKASI BENCANA GEMPA BUMI LOMBOK PADA MASA TANGGAP DARURAT DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT

Abstrak

Peristiwa bencana bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, terlebih negara Indonesia sebagian besar wilayahnya ditetapkan sebagai daerah rawan bencana atau ring of fire. Bencana merupakan serangkaian peristiwa mengancam dan dapat mengganggu sistem kehidupan serta penghidupan masyarakat. Pulau Lombok menjadi wilayah yang pernah mengalami bencana dahsyat yaitu Gempa Bumi pada tanggal 29 Juli 2018. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan koordinasi respon krisis yang dilakukan masyarakat Dusun Sankukun, Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theories Of Communication and Crisis Coordination dari Tierney. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Data Penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dalam merespon krisis bencana yang terjadi dengan cara koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Dusun. Kemudian masyarakat mengkolaborasikan tiga perspektif koordinasi krisis yakni Perspektif Birokrasi, Struktural dan Jaringan.

Kata Kunci: manajemen, komunikasi, koordinasi, bencana, gempa bumi

Abstract

Disaster events can occur anytime and anywhere, especially in Indonesia, most of its territory is designated as a disaster-prone area or ring of fire. Disasters are a series of threatening events and can disrupt people's systems of life and livelihoods. Lombok Island became an area that had experienced a devastating disaster namely the Earthquake on July 29, 2018. This study aims to describe the coordination of crisis response by the people of the Sankukun Hamlet, Genggeling Village, Gangga District, North Lombok Regency, West Nusa Tenggara. The theory used in this study is Theories Of Communication and Crisis Coordination, choosing Tierney. This research uses a qualitative approach. Research data were collected through in-depth interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the community in responding to the disaster crisis that occurred by way of coordination led by the Head of the Village. Then the community collaborates on three perspectives on crisis coordination, namely the Bureaucracy, Structural and Network Perspectives.

Keywords: management, communication, coordination, disasters, earthquakes

1. PENDAHULUAN

Definisi Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1, yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Nurjanah, 2012: 11). Sementara menurut *Asian Disaster Reduction Centre* dan *The United Nations*

mendefinisikan, bencana adalah suatu gangguan serius pada fungsi masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia material, atau lingkungan yang luas diluar batas kemampuan masyarakat yang terkena dampak dan mengharuskan mereka menghadapinya menggunakan sumber daya yang ada pada mereka (Kusumasari, 2014 : 3).

Bencana sendiri dapat membawa bahaya bagi masyarakat yang terdampak. Menurut Quarantelli, bahaya dari bencana dapat mengganggu masyarakat pada banyak hal, biasanya akan berakibat orang tewas atau terluka, bangunan rusak dan hancur, serta nilai properti yang hilang (Kusumasari, 2014: 13).

Bencana merupakan bagian dari krisis. Krisis sendiri merupakan kejadian besar yang berpotensi menghasilkan sesuatu negatif dan akan mempengaruhi organisasi, perusahaan atau industri, publik, produk, layanan atau nama baik (Fearn-Banks, 2011: 2). Setiap krisis yang terjadi perlu dimanajemen dengan baik untuk mengurangi resiko dan mencegah dampak negatif yang kemungkinan bisa terjadi. Manajemen krisis adalah suatu proses perencanaan strategis dalam menghadapi krisis, bertujuan untuk mengurangi resiko dan ketidak pastian dari kejadian negatif, sehingga memungkinkan organisasi lebih bisa mengendalikan nasibnya sendiri (Fearn-Banks, 2011:2).

Bencana alam merupakan komponen kunci dari kejadian krisis, meskipun organisasi tidak dapat disalahkan karena terjadinya bencana, namun organisasi dapat disalahkan jika keadaan normal tidak tercapai dengan cepat (Fearn-Banks, 2011:176). Maka dalam konteks organisasi pemerintah, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat sampai pemerintah paling bawah dengan masyarakat yang terkena bencana untuk memanajemen bencana supaya segera pulih.

Pada hari Ahad tanggal 29 Juli 2018 menjadi duka bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena dihari tersebut Bencana alam berupa gempa bumi berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR) mengguncang wilayah Lombok, Bali dan Sumbawa pukul 06.47 WIB (Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, Ed. 30 Juli 2018). Gempa Susulan terjadi pada hari Ahad, 5 Agustus 2018 pukul 18.46 WIB berkekuatan 7 SR menimpa kawasan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dan berpotensi Tsunami (detik.com, 5 Agustus 2018). Sejak terjadinya gempa pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan masa tanggap darurat sampai hari Sabtu, 25 Agustus 2018 (Tribunnews.com, 11 Agustus 2018). BNPB merilis data pertanggal 10 September 2018, gempa tersebut telah memakan korban jiwa 564 orang, 1.584 orang mengalami luka dan Total pengungsi 445.343 orang. Terdapat 214 kerusakan pada infrastruktur, 1.194 unit sekolah mengalami kerusakan. 321 fasilitas

kesehatan rusak, rumah ibadah rusak seperti masjid sejumlah 630 unit, 461 Mushola, 1 Gereja di Mataram, 1 Vihara dan 50 pura. Terakhir 46 unit pasar tradisional rusak, 566 Kios dan toko rusak, Hotel sebanyak 138 unit rusak. Total kerusakan mencapai 10,1 Triliun dan total kerugian sebesar 8,6 Triliun (Tempo.co, 10 September 2018).

Seluruh Wilayah di kawasan Nusa Tenggara barat mengalami gangguan kelangsungan hidup sebagaimana hakikat bencana yang telah dijelaskan diawal. Tak terkecuali Dusun Sankukun, Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara NTB. Dusun tersebut berjarak kira-kira 62 Km dari Kota Mataram Ibukota NTB dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam 53 menit. Tiga hari setelah gempa berkekuatan 7 SR, belum semua pengungsi terjangkau bantuan baik dari pemerintah maupun relawan. BNPB melalui siaran persnya pada Selasa, 7 Agustus 2018 mengungkapkan masih ada 21 desa terisolasi dan membutuhkan bantuan (liputan6.com, 9 Agustus 2018).

Dusun Sankukun dihuni oleh 138 Kepala keluarga dengan jumlah pendudukan 423 jiwa. Mulai tanggal 8 Agustus 2018 pukul 23.00 WIB, dusun tersebut mulai dibantu oleh Relawan Muhammadiyah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), relawan tersebut berasal dari SAR Mapala Muhammadiyah Indonesia (SARMMI) dan Hizbul Wathan UMS (Sarmmi dan HW UMS, 2018).

Sebelum Relwan Muhammadiyah tiba dilokasi bencana tersebut, warga mengakui belum tersentuh oleh bantuan. Ditengah masyarakat mengalami krisis, Kepala Dusun sebagai orang yang bertanggung jawab untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat dusun setempat sangat dibutuhkan perannya dalam manajemen krisis yang terjadi. Kepala Dusun merupakan pelaksana kewilayahan pada suatu desa dipilih oleh Kepala Desa, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri UU Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Mendagri RI, 2015 : 5).

Berdasarkan peran dan fungsi tersebut, Kepala Dusun melakukan koordinasi respon bencana saat tanggap darurat baik kepada pimpinan di atasnya maupun masyarakat dibawahnya atau relawan yang mendampinginya. Tanggap darurat menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 tahun 2011 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara segera saat kejadian bencana, untuk menangani dampak buruk yang kemungkinan timbul, mencakup kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban, penyelamatan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, dan pemulihan sarana dan prasarana (BNPB, 2011: 3). Tujuan dari tanggap darurat untuk menyelamatkan

kelangsungan kehidupan manusia, mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2015 : 94)

Setelah terjadi gempa bumi susulan yang berpotensi Tsunami, masyarakat dusun Sankukun meminta kepada Kepala Dusun untuk mengungsikan warganya ke Dusun tetangga yakni Dusun Bulan Semu, dikarenakan dusun itu terletak di dataran yang lebih tinggi. Saat-saat seperti inilah keputusan Kepala Dusun Sankukun sangat ditunggu oleh warganya, anataranya tetap bertahan didusunnya atau mengungsi ke tempat lain.

Setelah diputuskan Dusun Sankukun akhirnya mengungsi ke Dusun Bulan semu, tidak berselang lama di wilayah Lombok Utara marak terjadi tindak kriminalitas yaitu pembobolan rumah korban bencana yang kosong karena ditinggal mengungsi, tentu hal ini menambah masalah yang terjadi dilapangan saat itu. Melihat keadaan tersebut, akhirnya Kepala Dusun Sankukun memutuskan mengajak warganya untuk kembali ke Dusunya sendiri dan membuat posko darurat bencana.

Diakui oleh Relawan yang ikut mendampingi warga, secara umum Dusun Sankukun memiliki kerjasama yang bagus dalam merespon krisis bencana. Hal ini ditandai dengan sikap mandiri yang mampu mendirikan hunian darurat, mushola, sekolah darurat, toilet darurat serta dapur umum. Padahal dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat di dusun tersebut berpendidikan rendah dan tidak ada yang berpengalaman dalam kegiatan penanggulangan bencana sebelumnya. Tetapi dibawah koordinasi Kepala Dusun, warga mampu bergotong royong untuk melaksanakan proses penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Tentunya hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam terkait manajemen krisis yang dilakukan oleh Kepala dusun dan warganya hingga bisa demikian. Tanpa adanya proses komunikasi dan koordinasi yang baik pasti manajemen krisis saat tanggap darurat akan sulit dijalankan.

Kajian terkait manajemen komunikasi bencana sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain : Lestari, Puji (2012) dan Sawalha, Ihab (2013). Menurut penelitian Lestari, Puji (2012) tentang Manajemen Komunikasi Bencana Merapi pada saat tanggap darurat, hasil penelitiannya bahwa manajemen komunikasi bencana dilokasi tersebut menggunakan manajemen komunikasi partisipatif, hal ini sesuai dengan ketentuan UU penanggulangan bencana Pasal 33 huruf b. Di Kabupaten Sleman, tempat penelitian tersebut sudah memiliki perencanaan sektoral yang disusun dalam rencana kontijensi 2009

guna mengantisipasi apabila ada bencana merapi kembali. Rencana kontijensi tersebut meliputi: Perencanaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Evaluasi.

Terkait Manajemen krisis bencana, Sawalha, Ihab (2013) mengkaji tentang Manajemen Krisis dan Bencana di Hotel Yordania : Praktek dan Pertimbangan Budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hotel Yoradnia terkena berbagai risiko. Hotel Yordania kekurangan alat yang efektif dan komprehensif. Budaya organisasi mempengaruhi adopsi yang lebih luas dari manajemen krisis bencana dan menghasilkan praktik terbaik di hotel Yordania.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana koordinasi respon bencana yang dilakukan oleh Kepala Dusun Sankukun dengan Perangkat Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, serta relawan saat masa tanggap darurat bencana gempa bumi?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui koordinasi respon bencana yang dilakukan oleh Kepala Dusun Sankukun dengan Perangkat Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, serta relawan saat masa tanggap darurat bencana gempa bumi.

Manfaat penelitian ini nanti, harapannya dapat mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematis pada gempa Lombok. Dapat memahami sistem kerja subjek penelitian saat tanggap darurat bencana. Mampu memberikan rekomendasi tentang kebijakan suatu program. Dan bermanfaat untuk menambah wawasan, sekaligus pembelajaran jika suatu saat krisis kembali terjadi.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Riset kualitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara mendalam dan melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2006 : 56). Metode Kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu kejadian interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti (Usman, 2008 : 78).

Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Sankukun, Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan wilayah terdampak Gempa Bumi Lombok tahun 2018.

Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa, perangkat dusun dan Relawan Muhammadiyah yang terlibat dalam penanganan tanggap darurat gempa bumi di Lombok.

Sedangkan teknik sampling yang dilakukan menggunakan teknik *purposif sampling*. Adapun yang akan menjadi subjek penelitian adalah : Kepala Desa Genggaling, Kepala Dusun, dan Koordinator Relawan Muhammadiyah. Informan tersebut dianggap bisa memberikan informasi data yang dibutuhkan, kemudian yang digali dalam penelitian ini adalah kedalaman informasi bukan kuantitas informan.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*), Observasi Partisipan (*Participant Observe*) dan Dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan informan. Observasi partisipan yang dimaksud, peneliti terlibat secara langsung, menjadi bagian dari yang diriset bahkan tinggal bersama subjek penelitian dalam jangka waktu tertentu. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto dan seluruh dokumen yang dimiliki oleh subjek dan dapat mendukung penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif versi Miles and Huberman. Proses analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan dan dilakukan secara berkesinambungan mulai dari pengambilan data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Usman, 2008 : 85-88).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Kronologi bencana

Pada hari Ahad, 29 Juli 2018 pukul 06.47 WIB, Lombok Timur mengalami gempa bumi dengan kekuatan 6.4 SR. Hartanto (33) selaku Sekretaris Desa Genggaling Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat menceritakan, mulai saat itulah para warga sekitar termasuk Dusun Sankukun, bergotong-royong membantu masyarakat terdampak bencana. Sumbangan berupa uang dan kebutuhan dasar lainnya mereka kumpulkan dan disalurkan melalui Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Genggaling.

TSBD Genggaling ini dibentuk satu minggu sebelum gempa pertama terjadi di Lombok Timur. Berdirinya TSBD ini dilatar belakangi karena Desa Genggaling menjadi Desa teladan se-Kabupaten Lombok Utara. Untuk itu, Desa Genggaling diberi mandat untuk mengikuti kompetisi serupa ditingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara merekomendasikan Desa Genggaling supaya mendirikan tim yang siap siaga menghadapi bencana di tingkat desa. Dari situlah dibentuk Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Genggaling.

Tidak lama setelah bencana tersebut terjadi di Lombok Timur, kini giliran Lombok Utara serta wilayah yang ada di pulau Lombok dan sekitarnya diguncang gempa lebih dahsyat berkekuatan 7 SR, tepatnya pada hari Ahad, 5 Agustus 2018 pukul 18.46 WIB. Persis malam hari itu, pengurus TSBD sedang berkumpul di rumah Sekretaris Desa Genggelang untuk melakukan koordinasi dan evaluasi respon bencana di Lombok Timur. Setelah gempa gempa tersebut terjadi, dirinya langsung memastikan keluarganya semua selamat dan aman. Kemudian Hartanto menghubungi 20 Kepala Dusun Desa Genggelang. Namun malam itu, hanya ada 2 Kepala Dusun yang menjawab telfon tersebut. Hal ini membuatnya semakin khawatir terhadap kondisi para warganya. Tak lama kemudian, Hartanto dan TSBD menuju rumah Kepala Desa Genggelang. Namun ternyata Kepala Desa juga menjadi korban atas kejadian bencana kala itu, Kepala Desa mengalami cedera patah tulang punggung dan luka pada bagian Kepala. Saat itulah, Sekretaris Desa diberi kepercayaan oleh Kepala Desa Genggelang untuk menjadi penanggungjawab penanganan bencana di desa Genggelang.

Sama halnya dengan Kepala Dusun Sankukun Desa Genggelang, yaitu Nasrudin (39) turut menjelaskan kronologi bencana di dusun yang dipimpinya. Nasrudin mengatakan kondisi malam itu kacau, akhirnya Nasrudin pun hanya fokus menyelamatkan diri dan keluarganya. Saat itu sebagai kepala Dusun, Nasrudin tidak memberikan arahan apapun, dia sengaja membuat semuanya mengalir seperti air. Namun Nasrudin menyebutkan, kebiasaan masyarakat Lombok, khususnya Dusun Sankukun, jika dalam keadaan apapun terlebih saat ada musibah menimpa, para warga akan mencari para tokoh dan Kepala dusun. Hingga pada akhirnya peran dari Kepala Dusun dan tokoh setempat sangatlah diharapkan. Mulai saat itulah Kepala Dusun mulai mengarahkan para warganya dalam menghadapi krisis akibat bencana gempa bumi. Arahan pertama yang ia berikan kepada warga yaitu pembangunan kepercayaan.

“Bapak-ibu, mungkin dalam keseharian arahan, perkataan dari saya tidak begitu diperhatikan. Tapi tolong dalam kondisi darurat seperti ini, saya minta kerjasamanya kepada semua supaya mengikuti apa yang saya arahkan. Tapi jika ada yang tidak mau menuruti, silahkan, berarti itu sudah diluar tanggungjawab saya sebagai kepala dusun”.

Selama Dua hari warga dusun sankukun dalam memenuhi kebutuhan dasarnya hanya mengandalkan sisa beras dan makanan yang masih bisa diselamatkan dari runtunan rumah. Selain itu juga memanfaatkan sumber daya alam di kebun atau sawah warga setempat.

Saat itu beberapa dusun didesa Ganggalang belum tersentuh bantuan dari pemerintah ataupun relawan, termasuk Dusun Sankukun.

Pada hari Selasa, 7 Agustus 2018 pukul 23.00 WIB relawan Muhammadiyah yang berasal dari SAR Mapala Muhammadiyah Indonesia (SARMMI) dan Hizbul Wathan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) datang melakukan pendmappingan di Dusun Sankukun dan Dusun Bulansemu Desa Ganggalang, tim tersebut dipimpin oleh koordinator relawan yaitu Ahyar Stone (49). Berjumlah 5 personil sebagai relawan perintis, tim tersebut mulai bekerjasama dengan warga setempat untuk sama-sama berusaha memenuhi kebutuhan dasar warga setempat. Program kerja dan pencarian donaturpun mulai dilakukan oleh Tim Relawan Muhammadiyah dan melibatkan langsung peran dari tokoh serta masyarakat setempat. Bertambahnya hari, Penambahan personil relawanpun semakin bertambah.

Dimulai setelah relawan Muhammadiyah hadir ditengah korban bencana, dibuatlah Posko Relawan yang mendampingi Dusun Sankukun dan Dusun Bulan Semu Desa Ganggalang. Pada awalnya, kedua dusun tersebut mendirikan lokasi pengungsian di satu tempat yakni Dusun Bulan Semu. Hingga satu minggu setelahnya, Kepala Dusun Sankukun memerintahkan warganya untuk mendirikan Posko Pengungsian di Dusun Sankukun sendiri, hal ini berdasarkan usulan dari para warganya dengan salah satu tujuan supaya lebih dekat dengan harta benda yang ditinggalkan di rumah.

3.1.2 Pengorganisasian dan koordinasi

Pemerintah Desa Ganggalang dalam rangka menangani tanggap darurat bencana mengerahkan potensi dari TSBD yang sudah dibentuk sebelum gempa bumi terjadi.

”TSBD ini berperan secara utama, membantu pemerintahan Desa Ganggalang saat tanggap darurat dilakukan.”. Ujar Hartanto (33).

Pembentukan organisasi guna menangani krisis bencana yang terjadi akhirnya dilakukan. Dusun Sankukun dalam membentuk tim respon bencana tersebut tidak secara langsung membuat organisasi dan struktural baru. Melainkan dengan cara memfungsikan jabatan berlaku di dusun tersebut. Kepala Dusun Membawahi Ketua RT 1, RT 2 dan RT 3, Tokoh Agama, Ketua Peuda kemudian dibentuk juga petugas lainnya.

“..... Kemudian Ketua kader Posyandu dan Ibu-ibu PKK bertugas mengelola Dapur Umum serta pengontrolan kesehatan warga.....”. Jelas Nasrudin.

Lebih lanjut, kepala dusun menjelaskan, untuk koordinasi ataupun rapat, dirinya tidak menentukan jadwal rapat secara tertulis, namun koordinasi dilakukan secara

kondisional. Saat itu Warga Dusun Sankukun bersama Relawan Muhammadiyah membuat program kerja, antara lain : 1) Membuat Hunian Sementara (Huntara); 2) Membuat Dapur Umum; 3) Membuat Musholla; 4) Membuat Toilet Darurat; 5) Membuat Sekolah Darurat; 6) Mendata Kerusakan rumah warga; 7) Merobohkan bangunan-bangunan yang rawan roboh; 8) Mencari bantuan untuk memenuhi Kebutuhan Dasar; 9) Siaga Medis 24 Jam; 10) Psikososial.

Program-program tersebut dilaksanakan secara bersama-sama antara Relawan dengan masyarakat setempat. Menurut Ahyar Stone (49) selaku koordinator Relawan, dia dan timnya lebih berperan pada pendampingan warga. Tujuan dari Relawan yang membantu warga saat itu untuk mendampingi warga serta memberdayakan masyarakat secara langsung dalam menghadapi krisis bencana. Cara ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kondisi masyarakat. Para relawan melibatkan warga lebih aktif, agar rasa traumanya teralihkan dengan kesibukan yang bermanfaat.

“Selain itu, kami tim relawan tidak menjadikan masyarakat terdampak sebagai objek, tapi justru masyarakat terdampak adalah subjek aktif yang perlu didampingi dalam proses pemulihan pasca bencana” ujar Ahyar.

3.1.3 Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan tentu berdasarkan apa yang telah direncanakan pada sebelumnya. Meskipun saat dilapangan mengalami kendala sehingga harus merubah strategi sebelumnya. Hal ini wajar terjadi, mengingat kondisi dilapangan sangatlah dinamis. Mengingat saat pelaksanaan proses tanggap darurat, gempa bumi secara beruntun terus dirasakan oleh masyarakat. Fenomena ini tentu berpengaruh besar terhadap aktifitas masyarakat dan juga kondisi psikologisnya. Saat itu awarga masih menyimpan kekhawatiran, jika saat dirinya meninggalkan keluarga untuk beraktifitas normal, di khawatirkan terjadi gempa susulan yang besar.

Hartanto (33) selaku Sekretaris Desa mengatakan pelaksanaan selama dilapangan terkadang mengalami sedikit perubahan dari perencanaan sebelumnya. Tetapi secara keseluruhan pola koordinasi yang dibangun antara pemerintah desa dengan warga dusun berjalan baik.

Sementara Nasrudin (39) juga mengatakan Selama warga melaksanakan program kerja yang telah direncanakan, berjalan lancar meskipun ada kendala yang akhirnya merubah sedikit cara kami mensukseskan programnya. Pada saat itu, warga bisa membangun tenda pengungsian. Musholla darurat juga dibuat karena masjid warga

kondisinya sudah runtuh. Tempat untuk belajar anak-anak, Dapur Umum juga salah satu program warga. Semua kebutuhan makanan terpusat menjadi satu di dapur umum. Sehingga saat itu jika satu makan sayur, seluruh warga juga makan sayur tidak ada yang beda. Toilet darurat dibuat hasil gotong royong warga.

“Untuk kebutuhan dasar makanan, barang-barang material Alhamdulillah dibantu oleh Relawan Muhammadiyah yang mendampingi kami. Pengecekan kesehatan warga juga dilakukan oleh relawan”.

Ahyar Stone (49) koordinator relawan menjelaskan masyarakat lebih mandiri dalam pelaksanaan tanggap darurat. Meskipun diawal-awal setelah kejadian, rasa trauma masih sangat dirasakan oleh warga. Tapi tak lama kemudian Komunikasi mereka dipimpin baik, mulai dari Ketua RT, Kepala Dusun sampai pada pemerintah desa. Budaya masyarakat setempat yaitu sangat menghormati arahan dari pemimpinnya. Maka model komunikasi yang dibangun oleh relawan kepada warga diawali dengan pendekatan kepada Kepala Dusun setempat.

“Dari awal tim relawan datang, pendekatan pertama kepada Kepala Dusun, baru kemudian ke warga secara umum”.

3.1.4 Evaluasi dan Kendala

Seperti disampaikan pada poin sebelumnya, proses evaluasi dilakukan saat musyawarah, namun masyarakat tidak menjadwalkan waktu khusus untuk musyawarah. Tetapi diakui, justru pertemuan warga untuk diskusi, rapat dan sebagainya lebih intensif. Hampir setiap hari warga bertemu dan bermusyawarah sekaligus mengevaluasi program-program yang telah dilakukan.

Hartanto (33) menjelaskan pihaknya mengundang Kepala Dusun seperlunya saja, karena disisi lain Pemerintah mengalami kendala terkait dengan saranan dan prasarana yang rusak.

“Kebetulan Kantor Desa kami kondisinya mengkhawatirkan setelah terjadi gempa Dapat Bantuan Tenda dari BPBD untuk kami jadikan kantor pelayanan darurat”.

Proses komunikasi yang terjadi antara Kepala Dusun dengan Warga memiliki beberapa catatan evaluasi dan kendala. Nasrudin (39) selaku kepala dusun menjelaskan ada beberapa evaluasi kendala saat pelaksanaan tanggap darurat. Pada awal setelah terjadi gempa, komunikasi antar warga tidak berjalan baik, karena semua orang panik dan sibuk menyelamatkan diri dan keluarganya masing-masing. Kendala lainnya saat tanggap darurat adalah fasilitas sinyal telepon tidak baik, sehingga jika ingin menggunakan telepon untuk

mencari atau memebrikan informasi cukup suli. Kemudian kebutuhan dasar seperti selimut, makanan pokok dan lain-lain juga menjadi kendala saat itu.

“Tapi syukur Alhamdulillah datang tim relawan Muhammadiyah membantu kami dari awal hingga akhir, kurang lebih satu bulan meraka menemani masyarakat disini”.

Ahyar Stone (49) mengatakan saat proses tanggap darurat hal yang harus dievaluasi adalah penyebaran informasi yang belum tentu kebenarannya. Sempat muncul Informasi yang tidak benar, seperti akan terjadi Tsunami, padahal dari BMKG ataupun BPBD tidak membuat pengumuman tersebut. Hal semacam ini hanya menjadikan masyarakat semakin panik.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan tujuan penelitian ini yang ingin mengkaji cara warga dusun Sankukun memajemen krisis saat tanggap darurat bencana, maka dari data yang telah disajikan, selanjutnya akan dilihat menggunakan teori *koordinasi krisis*. Dalam Penelitian ini, peneliti sebelumnya telah mengobservasi secara langsung saat pelaksanaan tanggap darurat di dusun Sankukun. Untuk memperkaya data penelitian, peneliti juga telah mewawancarai para subjek penelitian.

Hasil penelitian menjelaskan, cara warga memajemen krisis dengan cara koordinasi antar berbagai pihak. Semua proses koordinasi dan pengambilan kebijakan dilakukan secara terpimpin oleh Kepala Dusun. Sama halnya seperti warga di Fiji Jepang saat terkena bencana alam Tsunami, memberikan pembelajaran sosial bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan saat menghadapi bencana (Takasaki, 2016).

Kepala Dusun melakukan pengorganisasian tidak dengan membuat struktur baru yang bertugas memajemen bencana, tapi melainkan dengan cara memberdayakan jabatan para tokoh warga setempat, seperti Ketua RT, tokoh agama, Ketua Pemuda dan Para Ibu-Ibu PKK. Diperkuat dengan sistem kerja gotong royong yang sebelum bencana terjadi sudah membudaya. Secara umum, budaya gotong royong mnejadi corak tersediri bagi masyarakat Indonesia. Kegiatan partisipasi dari masyarakat dalam menghadapi bencana, dipercaya memiliki pengaruh positif dalam mitigasi bencana. Hal ini serupa dengan masayarkat di Phang Nga, Thaailan yang daerahnya menjadi titik rawan Tsunami (Witvorapong, 2015).

Para warga dusun Sankukun juga secara sadar mengikuti arahan dari Kepala Dusun dan selalu berkomunikasi dengan baik dengan para tokoh masyarakat, meskipun sedang

dalam kondisi krisis. Jika mampu memajemen krisis secara efektif maka dampaknya tidak hanya meredakan krisis, tetapi dapat menjadikan sebuah reputasi organisasi lebih positif dari sebelum terjadi krisis. Secara pro-aktif pemerintah setempat menggandeng tenaga non-profit yakni relawan untuk menjadi *stakeholder* membantu kepala dusun dalam mengarah dan mengerahkan potensi masyarakat setempat. Cara ini pernah dilakukan oleh BPBD Klaten Jawa Tengah bekerjasama dengan para relawan saat melakukan mitigasi bencana para penyandang difabilitas. (Raden Roro Driadelta Juneza, 2016).

Kemudian penggunaan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp digunakan oleh relawan Muhammadiyah untuk memberikan informasi perkembangan masyarakat yang didampinginya. Penggalangan dana dan bantuan juga dilakukan melalui media sosial, baik pribadi maupun organisasi. Bentuk penyaluran informasi sosial, ideal dilakkan menggunakan media sosial, dimana rata-rata penyebaran atau *influentials* adalah kunci untuk komunikasi (Niles Meredith, 2019).

Dilihat dari asumsi teori Koordinasi krisis bahwa sebuah krisis yang tidak terkoordinasikan dengan baik maka akan menciptakan masalah baru yang tak terduga bagi pemangku kepentingan, serta membuat krisis semakin buruk. Tetapi berkat koordinasi yang baik antara elemen masyarakat Dusun Sankukun, Krisis yang terjadi mampu diatasi.

Tiga perspektif teori koordinasi krisis yang ditawarkan oleh Tierney yakni Perspektif Birokrasi, Struktural dan Jaringan. Ketiga perspektif tersebut disatu padukan saat menangani krisis bencana yang terjadi.

Perspektif Birokrasi: Pada perspektif ini diberlakukan matarantai komando dari tingkat atas hingga paling bawah. Saat itu pengendali manajemen bencana tertinggi tingkat Nasional diambil alih oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga pemangku kebijakan paling bawah yakni Kepala Dusun. Secara ketat pemangku kebijakan tertinggi akan mengambil alih komando dan mengontrol setiap orang dibawahnya dengan ketat. Hal ini dimaksudkan untuk merespon dan meredam kekacauan yang terjadi setelah bencana.

Perspektif ini juga dipraktikan oleh para pemangku kebijakan Desa Ganggalang khususnya Dusun Sankukun. Dimulai dari perangkat desa, saat itu dipimpin oleh Sekretaris Desa, kebijakannya diturunkan lagi ke Kepala Dusun. Dari Kepala Dusun diturunkan lagi ke Ketua RT, hingga sampai kepada warganya.

Perspektif Struktural: Pada model perspektif ini yaitu melakukan respon terhadap bencana dengan cara memadukan beberapa elemen atau Sumber Daya Manusia untuk saling bekerjasama menghadapi situasi krisis. Seperti halnya dilakukan oleh Kepala Dusun. Dengan kebijakannya, Kepala Dusun membuat struktur sederhana yang memanfaatkan fungsi jabatan warga sebelumnya. Namun tetap menambah bagian sesuai kebutuhan saat melakukan tanggap darurat bencana.

Struktur yang dibentuk untuk penanganan bencana di Dusun Sankukun saat itu adalah, Kepala Dusun sebagai pimpinan tertinggi di dusun tersebut. Dibawahnya terdapat Ketua Rukun Tetangga (RT), terdapat 3 Ketua RT. Pemuda/i dusun Sankukun dilibatkan secara aktif. Ketua Posyandu bertugas menjaga kesehatan warga. Kumpulan ibu-ibu PKK bertugas mendirikan dapur umum.

Perspektif Jaringan: Perspektif jaringan memiliki konsep menyatukan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bencana dengan memaksimalkan jaringan antar organisasi atau lembaga. Dua tipe dalam perspektif jaringan yang dimiliki Tierney (200), pertama yaitu memanfaatkan jaringan multi-organisasi dan memberikan layanan pusat informasi bersama. Berawal dari keterbukaan masyarakat bekerjasama dengan relawan Muhammadiyah, segala kebutuhan dasar pasca bencana dapat terpenuhi. Kemudian diperkuat lagi dengan jaringan relawan Muhammadiyah dengan para kerabat dan simpatisan Muhammadiyah untuk mencarikan donatur. Tipe jaringan kedua, terkait penyebaran informasi, semua terpusat kepada pemimpin masyarakat setempat yakni Kepala Dusun. Sebagai seorang pemimpin, Kepala Dusun berusaha selalu menyampaikan informasi yang berasal dari lembaga di atasnya. Misalkan Informasi pendataan kerusakan rumah warga, Kepala Dusun mengikuti arahan dari Pemerintah Desa, kemudian disosialisasikan kepada warga Dusun Sankukun.

Pada dasarnya, selain partisipasi dibutuhkan, kerja kolaboratif juga diperlukan. Antar satu pihak dengan pihak lainnya harus bisa berkolaborasi dengan baik, saat menghadapi krisis bencana. Petra Dickman dalam penelitiannya berpandangan komunikasi pengurangan resiko dalam menghadapi krisis diperlukan kerja kolaboratif sehingga dapat meningkatkan kinerja (Dickmann Petra, 2014).

Dengan demikian, saat masa tanggap darurat setelah bencana gempa bumi terjadi, cara masyarakat Dusun Sankukun merespon krisis yang terjadi yaitu dengan melakukan koordinasi. Fungsi koordinasi inilah yang menjadi perhatian penting dalam setiap kali menghadapi krisis bencana. Jika berkoordinasi dengan baik, maka idealnya krisis bisa

dihadapi dengan baik, namun sebaliknya, apabila koordinasi tidak berjalan baik, maka dimungkinkan akan semakin memperkeruh kejadian.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan respon di kalangan masyarakat Dusun Sankukun dalam menghadapi krisis bencana dilakukan dengan organisasi terpimpin, yakni dipimpin oleh Kepala Dusun. Dalam merespon krisis bencana, proses koordinasi berjalan baik antar beberapa unsur yaitu Tokoh masyarakat dan Pemuda Dusun Sankukun, Pemerintah Desa Genggelang dan Relawan Muhammadiyah. Budaya kepatuhan mengikuti arahan pemimpin juga masih sangat terasa kuat bagi masyarakat tersebut.

Penelitian komunikasi krisis bencana masih jarang dilakukan, terlebih penelitian yang dilakukan di tingkatan paling bawah yaitu Dusun ataupun Desa. Mengingat masyarakat terdampak bencana adalah subjek utama yang paling berperan dalam menghadapi krisis, maka dengan banyaknya penelitian krisis bencana pada sektor paling bawah bisa menjadi pembelajaran bersama terkait proses manajemen bencana. Selain itu untuk menyambut baik program pemerintah pusat yakni Desa Tangguh Bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2011). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana*. BNPB : Jakarta.
- Dickmann, Petra. (2014). Biedenkopf, Nadine; Keeping, Sam; Eickmann, Markus; Becker, Stephan; dkk. 2014. *Risk Communication and crisis communication in infectious disease outbreaks in Germany: what is being done, and what needs to be done*. Vol. 8, Iss. 3 (June, 2014): 206-211. DOI:10.1017/dmp.2014.36
- Fearn-Banks Kathleen. (2011). *Crisis Communication A Casebook Approach*. Taylor & Francis : New York.
- Jordan, Ray. (2018). *Gempa 7 SR Lombok Utara NTB Berpotensi Tsunami* di <https://m.detik.com> (diakses 27 Februari 2019).
- Kriyantono, Rachmat. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. KENCANA : Jakarta.
- Kusumasari, Bevaola. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Gaya Media : Yogyakarta.
- Lestari, Puji, Prabowo A., Wibawa A. (2012). *Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosisal dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta : Yogyakarta.

- Liputan6. (2018). *Pengungsi di perbukitan lombok utara belum tersentuh bantuan*. Diambil dari <https://www.liputan6.com/news/read/3613787/pengungsi-di-perbukitan-lombok-utara-belum-tersentuh-bantuan> (9 Agustus 2018).
- Majelis Tarjih dan Tajdid, Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah. (2015). *Fikih Kebencanaan : Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Ke-29 Tahun 2015 di Yogyakarta*. Majelis Tarjih dan Tajdid dan LPB PP Muhammadiyah : Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. Salinan Sesuai dengan Aslinya. Kemendagri : Jakarta.
- Niles, Meredith T, Benjamin F Emery, Reagan, Andrew J, Peter Sheridan Dodds, Danforth, Christopher M. (2019). *Social Media Usage patterns during natural disaster hazardz*. Plos One; San Francisco. DOI: Vol. 14, Iss. 2, e Vol. 14, Iss. 2, e0210484. .DOI:10.1371/journal.pone.0210484.
- Nurjanah, Sugiharto R., Kuswanda Dede, BP Siswanto, Adikoesoemo. (2012). *Manajemen bencana*. ALFABETA : Bandung.
- Pebrianto, Fajar. (2018). *Ini Data Lengkap Kerusakan Gempa Bumi Lombok Versi BNPB* di <https://bisnis.tempo.com> (diakses 27 Februari 2019).
- Ria. (2018). *Gempa Darat Guncang Lombok. Kedaulatan Rakyat*. Sajian Utama : 1 & 7 (Kol 4).
- Rismawan, Irwan. (2018). *Masa Tanggap Darurat Diperpanjang hingga 25 Agustus Korban Meninggal Tercatat 387 Orang* di m.tribunnews.com (diakses 27 Februari 2019).
- Roro, Raden Driadelta Juneza; Purworini, Dian. (2016). *Respon para disabilitas terhadap komunikasi krisis BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Tim SAR Klaten Tahun 2016*. E-Prints UMS. Vol. 10/No. 01/ April 2016. Hal. 3
- SARMMI dan HW UMS. 2018. *Laporan Tertulis Aksi Kemanusiaan Gempa Bumi Lombok*. Sarmi dan HW UMS : Surakarta.
- Sawalha, Ihab HS., Jraisat Luai Eid, AlQudah Kamal A.M. (2013). *Crisis and Disaster Manajemen in Jordanian hotels : practices and cultural considerations*. Jurnal Pencegahan Bencana dan Manajemen. Departemen Manajemen Resiko American University Of Madaba : Yordania.
- Sellnow, Timothy L., Seeger, Mathew W. (2013). *Theorizing Crisis Communication*. WILEY-BLACKWELL : United Kingdom.
- Susanto, Eko Harry, dkk. (2011). *Komunikasi Bencana*. ASPIKOM : Yogyakarta.
- Takasaki, Y. (2016). Learning from disaster: Community-based marine protected areas in Fiji. *Environment and Development Economics*, 21(1), 53-77. doi:10.1017/S1355770X15000108.

Usman, Husaini, Akbar, Purnomo Setiady Akbar. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara : Jakarta.

Witvorapong, Nopphol; Muttarak, Raya; Pothisiri, Wiraporn. (2015). *Social Participation and disaster risk reduction behaviors in Tsunami Prone Areas*. PloS One; San Francisco vol. 10, Iss. 7, e0130862. DOI:10.1371/journal.pone.0130862.